

## Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Kuningan dan Perak di Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau

Community Empowerment of Brass and Silver Craftsmen in Melai Village, Murhum District, Baubau City

Alimin <sup>1\*</sup>, Asmidin <sup>2</sup>, La Didi <sup>3</sup>

<sup>1\*2,3</sup> Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia

e-mail:

\* Corresponding Author

### INFORMASI ARTIKEL

Print ISSN : 2302-254X

Online ISSN : 2963-4628

**Kata kunci:** Pemberdayaan, Kerajinan Kuningan dan Perak

**Keywords:** *Empowerment, Brass and Silver Crafts*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat pengrajin kuningan dan perak di Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pertama, menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu data teks seperti transkrip atau data gambar seperti foto) untuk dianalisis kedua, mereduksi data dan (ketiga) menyajikan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dilakukan mulai tahap enabling yaitu dengan memotivasi dan memberikan kesadaran pada pelaku industri akan pentingnya pengembangan industri kerajinan kuningan dan perak. Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan secara individu dengan memperkuat potensi yang dimilikinya melalui pelatihan, pemberian modal usaha, pemberian akses kesehatan secara mandiri dan mengikutsertakan beberapa pengrajin ke luar daerah. Namun modal usaha dari pemerintah masih terbatas, sehingga masyarakat mengajukan permodalan melalui perbankan. Pengrajin industri kerajinan kuningan dan perak dilindungi oleh pemerintah melalui kebijakan, namun belum ada kebijakan khusus.

*The research aims to describe the community empowerment process of brass and silver craftsmen in Melai Village, Murhum Sub-district, Baubau City. This research uses a qualitative descriptive design. Data sources are primary data and secondary data. Data were collected through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are first, preparing and organizing data (namely text data such as transcripts or image data such as photos) for analysis second, reducing data and (third), presenting data. The results showed that the community empowerment process was carried out starting from the enabling stage, namely by motivating and providing awareness to industry players of the importance of developing the brass and silver craft industry. Community empowerment is also carried out individually by strengthening their potential through training, providing business capital, providing independent access to health and including some craftsmen outside the region. However, business capital from the government is still limited, so the community applies for capital through banks. Brass and silver craftsmen are protected by the government through policy, but there is no specific policy yet.*

## PENERBIT

Universitas Dayanu Ikhsanuddin.  
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124,  
Kode Pos 93721 Baubau,  
Sulawesi Tenggara, Indonesia.  
Email: [journaladm2110@gmail.com](mailto:journaladm2110@gmail.com)

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat dewasa ini telah menjadi program unggulan pemerintah baik pusat maupun daerah. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait telah mendorong pemerintah daerah agar menggerakkan potensi masyarakat yang sebelumnya hanya bernilai historis ke nilai sosial ekonomis. Pemberdayaan dalam hal ini diharapkan terjadi penambahan nilai dari suatu barang yang bersumber dari kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan bukan hanya pada aspek pendidikan, psikologi maupun politik, Friedman (Hadi, 2015) melainkan semua aspek yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Selama ini pemberdayaan lebih diarahkan pada program padat karya, misalnya proyek-proyek pedesaan, padahal program ini hanya bersifat sementara dan belum tentu

berdampak untuk jangka panjang. Selain itu pemberdayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, adanya konflik kepentingan dan peran pendamping yang lemah, (Pranarka., 1996) dan peran pemerintah desa kurang maksimal dalam memberdayakan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi (Sarinah et al., 2019).

Proses pemberdayaan masyarakat pada sektor sosial ekonomi masyarakat perlu diwujudkan guna mencapai tujuan pemberdayaan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kinerja yang secara terus menerus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, (Nugraha, 2009). Hal dilakukan dalam upaya melepaskan masyarakat dari keterbelakangan secara ekonomi, sosial dan politik dapat dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek pemberdayaan dan bukan obyek pemberdayaan.

Untuk itu, pengrajin kuningan dan perak bukan sebagai obyek namun subyek dari pemberdayaan. Masyarakat dapat memilih kebutuhan apa yang menjadi prioritas pemberdayaan, sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Masyarakat Kelurahan Melai Kota Baubau misalnya, dapat memilih bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga.

Menurut (Yusuf & Hasima, 2018) di Kota Baubau terdapat beberapa kesenian daerah seperti musik, tari, kerajinan tangan khas daerah dan lain sebagainya yang masih tetap eksis di masyarakat. Kerajinan tangan masyarakat yang turun temurun ini bila dikembangkan dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap ekonomi keluarga dan pelestarian seni dan kerajinan lokal. Kerajinan perak dan kuningan yang dikembangkan oleh masyarakat, diberdayakan dengan pendekatan individu. Proses pemberdayaan tidak melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, namun hanya individu yang dianggap memiliki keterampilan dan memiliki genetik pengrajin perak dan kuningan.

Pemberdayaan masyarakat pengrajin kuningan dan perak di Kelurahan Melai berdasarkan hasil observasi awal, telah diupayakan oleh pemerintah melalui penguatan kesadaran untuk pengembangan jenis kerajinan tersebut. Penguatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan upaya pemberian akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti pelatihan, modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Fakta empiris lain terkait proses pemberdayaan masyarakat pengrajin kuningan dan perak di Kelurahan Melai adalah pemerintah masih menempatkan diri sebagai aktor yang memegang kekuasaan dalam proses pemberdayaan. Pemerintah belum menempatkan diri sebagai katalisator dan fasilitator dalam proses pemberdayaan. Artinya masyarakat pengrajin belum sepenuhnya ditempatkan sebagai aktor utama atau subyek dari pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat pengrajin kuningan dan perak di Kelurahan Melai Kota Baubau tergolong baik, karena secara prospektif, memberdayakan masyarakat yang telah memiliki keterampilan lebih mudah ketimbang memberdayakan masyarakat yang belum jelas kemampuan atau ketrampilannya, oleh karena itu upaya pemerintah memberikan pelatihan pada masyarakat pengrajin kuningan dan perak sangat potensial untuk diberdayakan.

Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan pemberian akses pengembangan potensi kerajinan. Tahap ini, masyarakat difasilitasi agar memberdayakan potensi yang telah dimiliki. Menurut (Nanang, Supriadi & Wan, Jamaludin, 2021) pemberdayaan masyarakat memanfaatkan kerajinan cangkang kerang, sebanyak 85% dari seluruh pengrajin telah paham dan berhasil meningkatkan pendapatan keluarga.

Kerajinan masyarakat akan berkembang melalui pemberdayaan, namun diperlukan pendekatan atau cara yang memungkinkan kerajinan tersebut dapat bernilai tambah. Menurut (Apriansah, 2017) bahwa proses pemberdayaan ekonomi masyarakat akan berkembang dengan tiga pendekatan, yaitu penyadaran, peningkatan kapasitas, dan hasil produk kerajinan. Upaya lain dalam proses pemberdayaan menurut Shuckmith (2013) dalam (Sulila, 2016) bahwa pendekatan *bottom up* merupakan cara dalam pembangunan pedesaan berdasarkan pada asumsi bahwa sumber daya spesifik daerah, alam, manusia dan budaya memegang kunci pemberdayaan.

Menurut (Kartasasmita, 1998), (Noor, 2011) untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : Pertama, *enabling*. Kedua, *empowering*. Ketiga, *protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Lebih lanjut (Kartasasmita, 1995) menjelaskan; pertama; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya; Kedua; memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) dengan peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran; Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbangan, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*), karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri {yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain}.

Pendapat Kartasasmita di atas sangat relevan untuk mendeskripsikan dan meramalkan masa depan pemberdayaan masyarakat pengrajin kuningan dan perak. Tahap pertama adalah *enabling* yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. *Enabling* dilakukan dengan memberikan motivasi, penguatan dan penyadaran kepada pelaku industri kerajinan. Langkah ini penting untuk diperhatikan karena tanpa memberikan kesempatan pada masyarakat, sama halnya yang menjadi aktor pemberdayaan adalah pemerintah itu sendiri. Tahap kedua adalah *empowering* yaitu memberikan akses masyarakat pengrajin untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya serta pemberian kemudahan untuk bantuan modal pengembangan kerajinan. Dan tahap ketiga adalah *protection* atau perlindungan yaitu menjaga agar apa yang telah dimiliki oleh masyarakat tidak dikuasai oleh orang lain yang memiliki kekuasaan secara ekonomi maupun politik.

Mengacu pada konteks permasalahan di atas penting dilaksanakan penelitian terkait pemberdayaan masyarakat pengrajin kuningan dan perak di Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau. *Enabling* pemberdayaan masyarakat pengrajin kuningan dan perak di Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum Kota Baubau. *Empowering* pemberdayaan masyarakat pengrajin kuningan dan perak di Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum Kota Baubau. *Protecting* pemberdayaan masyarakat pengrajin kuningan dan perak di Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum Kota Baubau.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pemberdayaan perspektif ilmu administrasi publik

Lokus dari ilmu administrasi negara bukan lagi lembaga pemerintah, tetapi masalah dan kepentingan publik (*publicness*), sehingga meluas pada semua bentuk organisasi yang bergerak dalam penyelenggaraan *public affairs* (masalah publik) dan *public interest* (kepentingan publik), (Wulandari, 2017). Realitas publik selama ini bahwa banyak aktor potensial dalam masyarakat yang bisa berperan secara optimal dalam proses pemenuhan kebutuhan publik, sebagaimana dalam paradigma *governance* yang menempatkan tiga aktor dalam pelayanan publik. Semua konsep baru dalam *governance* menekankan pentingnya birokrasi membalik orientasinya dari sekedar meletakkan manusia sebagai komponen *production centered development* ke arah *people centered development*, (Soetomo, 2013). Ini berarti bahwa kita akan menggunakan segala input sumber daya manusia untuk membangun masyarakat secara berswasembada dan swadaya. Wawasan birokrasi haruslah wawasan efisiensi yang mengacu pada pembangunan yang berpusat pada manusia dalam segala aspek keterlibatannya, (Wulandari, 2017)

Hal ini relevan dengan pendapat G. Caiden (1982) dalam (Keban, 2014) administrasi publik sebagai *administration of public* atau administrasi dari publik, ada *administration for public* atau administrasi untuk publik. Menurut (Keban, 2014) administrasi publik adalah sebagai *administrasi by public* atau administrasi oleh publik. Lebih lanjut (Keban, 2014) bahwa “kemajuan administrasi publik berkembang dari paradigma yang tidak demokratis sampai paling demokratis, atau dari yang tidak memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat sampai benar-benar memperhatikan pemberdayaan masyarakat”.

Ilmu administrasi publik pada aspek pemberdayaan mengacu pada istilah *administration by public* yaitu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi kesempatan untuk itu, (Keban, 2014). Selanjutnya (Keban, 2014) mengatakan bahwa “kegiatan pemerintah mengarah kepada “empowerment” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa menggantung hidupnya pada pemerintah”.

Menurut (Osborne, 2000) pemberdayaan dalam tiga sub bahasan yaitu pemberdayaan organisasi, pemberdayaan pegawai dan pemberdayaan masyarakat. Menurut (David. dan P. Osborne, 2000) pemberdayaan masyarakat dalam konteks New Public Management (NPM) memiliki keunggulan yaitu; 1) Masyarakat lebih memiliki komitmen terhadap anggotanya dibanding sistem pemberian pelayanan terhadap kliennya. 2) Masyarakat lebih memahami permasalahannya sendiri dibanding pemberi jasa profesional. 3) Professional dan birokrasi memberikan layanan; masyarakat memecahkan masalah. 4) Lembaga dan profesional menawarkan jasa; masyarakat menawarkan kepedulian. 5) Masyarakat lebih fleksibel dan lebih kreatif dibanding pelayanan birokrasi yang besar. 6) Masyarakat jauh lebih murah dibanding profesional. 7) Masyarakat menegakkan standar perilaku secara lebih efektif di banding birokrasi atau profesional. 8) Masyarakat memfokuskan pada kapasitas; system jasa memfokuskan pada defisiensi.

Sedangkan pada konteks New Public Service (NPS) yang dimotori (Denhardt, 2013) bahwa “layanan publik baru menganjurkan peran aktif aktif dan positif para administrator dalam memfasilitasi keterlibatan warga Negara dalam mendefinisikan dan bertindak berdasarkan kepentingan publik”. Artinya birokrasi publik diberi kewenangan untuk kegiatan pendampingan terhadap masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberdayakan warga Negara dalam bertindak untuk kepentingan publik. Dalam pandangan NPS pemerintah harus mendorong warga Negara untuk menunjukkan perhatian mereka kepada komunitas yang lebih besar, komitmen mereka kepada masalah yang melampaui kepentingan jangka pendek dan kesediaan mereka menerima tanggungjawab pribadi terhadap apa yang terjadi di lingkungan dan komunitas mereka”, (Denhardt, 2013). Masyarakat dalam pandangan NPM diberdayakan dan bertanggungjawab untuk kepentingan mereka dalam lingkungan mereka juga untuk kepentingan jangka panjang. Lebih lanjut (Denhardt, 2013) mengatakan bahwa “pemilik kepentingan publik adalah warga Negara sehingga administrator seharusnya menekankan tanggungjawab mereka untuk melayani dan memberdayakan warga Negara melalui manajemen organisasi publik dan pengimplementasian kebijakan publik”.

Empowerment adalah istilah umum saat ini yang sering dianggap remeh, istilah ini muncul pada 1960-an sebelum kebangkitannya pada 1990-an dan kemunculannya di mana-mana dalam wacana kontemporer, serta fokus pada kebijakan sosial, pekerjaan sosial, dan wacana tentang kesehatan dan perawatan sosial, (McLaughlin, 2016). Selain itu pemberdayaan penekanan pada pemberdayaan telah menggantikan gagasan tentang aktor politik yang menjalankan kekuasaan secara otonom, (McLaughlin, 2016).

Pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian “masyarakat sebagai obyek (*community development*) subyek (*community-based development*) Chambers dalam (Ginandjar, 1995). Pemberdayaan dapat dikelompokkan kedalam dua aliran yaitu developmentalisme dan anti developmentalisme. Aliran developmentalisme berkembang dikalangan para aktivis sosial pada tahun 1970an, aliran ini didasari oleh kesadaran naif atau reformatif, yang melihat faktor

manusia sebagai akar masalah ketidakberdayaan mereka. Aliran anti developmentalisme yang mulai berkembang pada tahun 1980an, yang mempertanyakan gagasan dasar dari diskursus pembangunan, (Widayanti, 2012).

Penganut developmentalisme mendefinisikan pemberdayaan (Adams, 1996) sebagai alat untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat supaya mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka, sehingga mampu bekerja dan membantu diri mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup.

Penganut post-developmentalisme mengartikan pemberdayaan sebagai alternative development, yang menghendaki 'inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity Menurut John Friedman (1992) (Hadi, 2015). Selanjutnya (Tesoriero, 2008) membagi pandangan pemberdayaan ke dalam beberapa kelompok: pertama, penganut strukturalis memaknai pemberdayaan sebagai upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang opresif; kedua, kelompok pluralis memandang pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu 'rule of the game' tertentu; ketiga, kelompok elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliansi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis; dan keempat, kelompok post-strukturalis, pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial.

Menurut Ife dan Tesoriero (2008) gagasan pemberdayaan sebagai sentral bagi suatu strategi keadilan sosial dan HAM walaupun telah digunakan secara berlebihan dan sedang berada dalam bahaya kehilangan substansinya. Lebih lanjut Ife dan Tesoriero (2008) mengatakan bahwa kerja pemberdayaan mencakup tujuan pemberdayaan yaitu meningkatkan keberdayaan dan mereka yang dirugikan. Pandangan ini berkaitan dengan konsep keadilan dan HAM. *Empowerment* (pemberdayaan) pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain.

Hal ini relevan dengan Naila Kabeer dalam (Narayan, 2005) pemberdayaan sebagai "peningkatan kemampuan manusia untuk membuat pilihan hidup strategis dalam konteks di mana kemampuan ini sebelumnya ditolak oleh mereka". Kabeer menekankan perlunya penguatan sumber daya, agensi, dan prestasi kelompok miskin. Pemberdayaan juga terkait perluasan aset dan kemampuan orang miskin untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, mengendalikan, dan meminta institusi bertanggungjawab terhadap sesuatu yang mempengaruhi kehidupan mereka" (Narayan, 2002).

Menurut Payne (1997) dalam (Dhio Adenansia, 2011) bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Sedangkan menurut Kartasasmita (1995) pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui beberapa kegiatan : pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi, Pemberdayaan harus menjadi tujuan akhir dari setiap proyek pengembangan masyarakat, (Sianipar et al., 2013). *Enabling* yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Empowering* yaitu dengan peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran, dan *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah,

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbangan, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pendapat yang serupa (Nurdin et al., 2014) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan. Menurut (Lee, 2001) Ada tiga dimensi yang saling terkait dalam pemberdayaan: 1) pengembangan rasa yang lebih positif dan kuat dari dalam diri sendiri, 2) peningkatan pengetahuan dan kapasitas dalam memahami secara kritis tentang jaringan realitas sosial dan politik seseorang, dan 3) pengembangan sumber daya dan strategi, atau kompetensi yang lebih fungsional, untuk tercapainya tujuan pribadi dan tujuan bersama).

Menurut Arbi Sanit dalam (Chalid, 2005) bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mentransformasikan segenap potensi pertumbuhan masyarakat menjadi kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Dalam pemberdayaan masyarakat nilai-nilai yang dimaksud adalah kearifan lokal. Terkadang kearifan lokal tidak menjadi perhatian dalam pemberdayaan sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal bahkan cenderung gagal dalam pencapaian tujuan. Kearifan lokal sebagai tatan nilai dan menjadi pedoman hidup yang dimiliki masing-masing kelompok masyarakat yang beragam antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

Selanjutnya menurut (Anwas, 2014) pemberdayaan masyarakat sebagai proses menjadikan masyarakat mandiri secara ekonomi, sejajar dalam aspek sosial budaya, berpengetahuan dan nyaman dalam pergaulan hidup. Menurut (Narayan, 2002) dalam pemberdayaan ada empat element kunci keberhasilan yaitu Akses ke informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas dan kapasitas organisasi lokal. strategi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat, ada tiga pokok yang harus diperhatikan yaitu terarah (*targetted*), masyarakat sebagai subyek, pendekatan kelompok, Kartasasmita (1995).

### **Industri kerajinan tangan**

Kerajinan tangan atau industri kerajinan tangan (*handycraf*) merupakan industri kecil rumah tangga. Industri kecil sebagai industri yang cocok dikembangkan untuk bergerak pada dimensi pengembangan usaha yang ditopang sumber-sumber dari lingkungan masyarakat sekitar, Irsan (1991) dalam (Luh et al., 2016).

Menurut (Tambunan, 2002) industri rumah tangga pada umumnya adalah unit-unit usaha yang sifatnya lebih tradisional, dalam arti menerapkan sistem organisasi dan manajemen yang baik seperti lazimnya dalam perusahaan modern, tidak ada pembagian kerja dan sistem pembukuan yang jelas.

Industri kerajinan merupakan salah satu industri kreatif yaitu jasa periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio serta riset dan pengembangan, (Amir, 2017). Industri memiliki karakter antara lain, kegiatan produksi yang memiliki nilai tambah, hasil produksi dapat dilakukan secara massal dengan cepat dan akurat, proses produksi melibatkan mesin dan ilmu pengetahuan, memiliki sasaran pelanggan yang terukur, dan dapat dilakukan inovasi produksi secara terus menerus. Pada intinya, industri terkait dengan efisiensi, fungsi organisasi produksi maupun pemasaran, ketepatan waktu produksi maupun delivery. (Amir, 2017)

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Tobing (1983) dalam (Telagawathi et al., 2016) bahwa tumbuhnya industri kerajinan rumah tangga mula-mula hanya merupakan suatu pekerjaan sampingan dan kemudian berkelanjutan karena adanya permintaan yang tetap dan menambah penghasilan". Industri menurut (G. Kartasapoetra, 1987) adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan-bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bernilai tinggi".

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Menurut Guba dan Lincoln (Wahab, 2011) metode kualitatif yang naturalistik memungkinkan peneliti berbicara langsung dalam suasana keakraban, tidak kaku, dan rutin serta bebas.

Alasan menggunakan metode kualitatif yaitu adanya permasalahan atau isu yang perlu di eksplorasi, ingin memberdayakan individu untuk dapat menceritakan kegiatan kerajinan, ingin memahami konteks atau masalah pemberdayaan masyarakat industri kerajinan kuningan dan perak, selain itu fokus penelitian lebih cocok menggunakan metode kualitatif, (J. W. Creswell, 2014).

Sumber data penelitian kualitatif terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut (Faisal, 2003) tiga sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu, orang, dokumen, situasi atau peristiwa. Pemilihan informan di pilih dengan cara *purposif sampling*. Informan penelitian ini sebanyak 9 orang yaitu Kepala Seksi Masyarakat Kelurahan Melai, Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Lembaga Pemberdayaan masyarakat, masyarakat pengrajin kuningan dan perak 6 orang masyarakat pengrajin kuningan dan perak.

Teknik Pengumpulan Data yaitu diskusi dengan informan, mengamati kegiatan pengrajin dan dokumentasi kegiatan, (J. Creswell, 2015). Data dianalisis dengan metode menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu data teks seperti transkrip atau data gambar seperti foto) untuk dianalisis; kedua, mereduksi data dan terakhir (ketiga), menyajikan data Creswell (2014:251). Data yang dikumpulkan dan disajikan telah dilakukan pemeriksaan data untuk memastikan bahwa data telah valid dan layak untuk di susun dalam naskah penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pemberdayaan Masyarakat pengrajin Kuningan dan perak

Enabling pemberdayaan pengrajin

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dari kurang berdaya ke arah lebih berdaya, dari prasejahtera menuju ke kesejahteraan, dari kurang beruntung menjadi lebih beruntung. Upaya tersebut memerlukan proses panjang, terencana, dan berkelanjutan. Selain itu diperlukan dukungan dari berbagai stakeholder (pemangku kepentingan), baik pemerintah, sektor swasta, pendidikan tinggi, media massa dan pemangku kepentingan lainnya.

Mengacu pada temuan bahwa upaya memberdayakan masyarakat dengan memotivasi dan memberikan penyadaran pada pelaku industri akan pentingnya pengembangan industri kreasi pernak pernik atau kerajinan kuningan dan perak yang dapat menarik minat pasar, dan bukan hanya sebagai aksesoris melainkan memiliki nilai tambah secara ekonomis, historis dan identitas lokal.

Temuan di atas relevan dengan temuan (Umah, 2019) bahwa pemberdayaan awalnya dilakukan penyadaran, peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Hal ini merupakan langkah awal untuk diperhatikan dalam proses pemberdayaan. Sebaik apapun dalam suatu program pemberdayaan tanpa penguatan awal, maka sulit untuk melepaskan masyarakat dari ketidakberdayaan.

Menurut (Santosa, 2020) bahwa *enabling* (pengembangan) IKM dilakukan melalui penguatan branding dalam Ekonomi Kreatif, Promosi dan Pemasaran digital dan memetakan faktor- faktor internal maupun eksternal, memperkuat iklim usaha yang sehat, menyodorkan bantuan modal usaha, proteksi usaha dari pemerintah, mengupayakan pengembangan kekuatan mitra-usaha, pengembangan promosi, dan pengembangan kerjasama yang setara. Setiap upaya diatas merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya, (Sururi, 2018). Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik.

Temuan yang sama (Lifa Indri Astuti., 2015) bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan dengan tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan, keahlian dan kekuatan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat dapat dimulai dari proses enabling diharapkan dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.

Konsep enabling, dalam pemberdayaan terkait dengan adanya kesadaran bahwa masyarakat atau subyek dari pemberdayaan memiliki potensi dan kemampuan untuk melepaskan diri dari kebelunggu ketidakberdayaan. Tahap enabling dalam proses pemberdayaan sangat penting dan harus memastikan apa yang perlu diberdayakan telah teridentifikasi dengan baik. Identifikasi awal dalam proses pemberdayaan dimaksudkan memastikan bahwa apa yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu dalam konsep pemberdayaan masyarakat merupakan aktor utama, karena mereka yang merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi atas apa yang telah dilakukan. Masyarakat sebagai subyek dianggap paling mengetahui kebutuhan dan keadaan dirinya, sehingga peran pendamping atau pemerintah adalah sebagai fasilitator.

Menurut Fiedmann dalam (Hutomo, 2000) pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Langkah tersebut, juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam proses pemberdayaan pengrajin kuningan dan perak di kelurahan Melai Kota Baubau. Penyadaran, penguatan dan motivasi merupakan bentuk enabling (penguatan) yang dilakukan untuk memberdayakan pelaku industri kerajinan kuningan dan perak.

Menurut Freire (1973) dalam (Soebianto, 2013), penyadaran masyarakat agar bebas dari tekanan merupakan proses pemberdayaan masyarakat. olehnya itu, proses pemberdayaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kebebasan agr tidak menimbulkan ketergantungan. Masyarakat diberi ruang seluas-luasnya untuk memanfaatkan semua kemampuannya mengutarakan pengalamannya serta dapat mengembangkan pola pikirnya. Kedudukan fasilitator dan penerima informasi atau manfaat adalah sejajar atau mitra, namun memiliki peran yang berbeda, (Hamid, 2018).

Menurut (Soebianto, 2013) penyadaran masyarakat dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya, baik sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungan, seperti lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi dan politik. Selanjutnya peningkatan kesadaran adalah aktivitas kognitif yang didorong oleh pertanyaan dengan harapan hasil kesadaran baru diri dalam kaitannya dengan semua masyarakat, (Lee, 2001). Hal ini sepemndapat dengan Freire dalam (Lee, 2001) bagaimanapun, baik tindakan berbagi pengalaman pribadi maupun kesadaran itu sendiri bukanlah produk akhir. Produk dari kesadaran kritis, atau kesadaran, adalah tindakan. Refleksi harus diikuti dengan tindakan, baik pribadi maupun politik.

Hal yang sama dalam proses peningkatan kesadaran masyarakat pengrajin Kuningan dan perak, pemerintah sebaiknya hanya sampai proses penyadaran, melainkan memastikan masyarakat menyadari dan melakukan apa yang telah disadarinya. Sebaik apapun tingkat pengetahuan dan kesadaran palaku industry kerajinan kuningan dan perak jika tidak dibarangi dengan pelaksanaan, maka tidak akan memberikan kontribusi apapun. Itulah hakikat praksis, proses dimana kita berefleksi, bertindak, kemudian berefleksi kembali secara spiral. Namun, pandangan orang dalam pendekatan pemberdayaan tidak hanya sebagai "pelaku" (Turner 1996) dalam (Lee, 2001).

Pelaku industri kerajinan tangan penting memahami dan menyadari, bahwa kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki perlu diaplikasikan. Bukan untuk dijadikan sebagai pengetahuan

semata, melainkan praktek atau pelaksaan dari kesadaran itu sendiri. Praktik pemberdayaan memerlukan pemikiran kritis karena membahas masalah sumber daya individu, keluarga, dan organisasi (multidimensi kemiskinan), masalah hubungan pertukaran asimetris, masalah ketidakberdayaan dan struktur kekuasaan yang menghambat atau menghambat atau membatasi struktur kekuasaan, dan masalah yang terkait dengan kriteria sosial yang sewenang-wenang. atau nilai-nilai, (Lee, 2001).

Ketidakberdayaan pelaku industri kerajinan kuningan dan perak sebagai daya tarik sosial yang rendah karena sumber daya yang buruk (sumber daya material terbatas dan mitos). Untuk membantu memberdayakan, pertama-tama kita harus belajar berbicara secara terbuka tentang kekuasaan dengan klien (pelaku industri) dan kemudian terlibat dalam pemeriksaan basis kekuasaan yang berasal dari sumber daya pribadi (kekuatan psikobiososial dan kekuatan sosial ekonomi), kekuatan artikulasi, kekuatan simbolik, kekuatan posisional, atau otoritas, dan kekuatan formal. dan kekuatan organisasi informal, (Lee, 2001). Aspek pentingnya penyadaran masyarakat adalah adanya mitos masyarakat bahwa pengrajin kuningan dan perak dipraktikkan secara genetik. Hal ini merupakan pertanyaan paling sulit yang dihadapi sebagian besar masyarakat.

#### Empowering masyarakat industri kerajinan kuningan dan perak

Sebagaimana diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat pengrajin kuningan dan perak dilakukan secara individu dengan memperkuat potensi yang melalui pelatihan, pendidikan nonformal dan mengikutsertakan beberapa pengrajin ke luar daerah. Namun pemberian modal usaha yang sumbernya dari pemerintah masih terbatas, sehingga masyarakat dapat mengajukan permintaan melalui perbankan.

Temuan diatas relevan dengan temuan (Nimayah, 2015) pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara, yakni 1) pelatihan usaha, 2) advokasi, 3) permodalan, 4) pemasaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pelatihan, penyuluhan, pemberian modal dan informasi pasar. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan proses Pendidikan dan pelatihan sebagaimana temuan (Lifa Indri Astuti., 2015) yaitu penyadaran, pengembangan kapasitas dan pendayaan.

Artinya bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu mengembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian, salah satunya melalui pelatihan dan Pendidikan” Suharto dalam (Sismudjito, 2016).

Selain pelatihan dalam proses pemberdayaan masyarakat diperlukan sosialisasi, sebagai upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Peningkatan kesadaran kritis dan dialog adalah metode kunci dalam praktik pemberdayaan, (Lee, 2001). Selain itu sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta pihak-pihak yang terkait mengenai program, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena dengan sosialisasi akan sangat menentukan minat dan ketertarikan masyarakat untuk ikut serta atau berpartisipasi pada suatu program pemberdayaan masyarakat, (Soebianto, 2013).

Pemberdayaan bukan hanya terkait aktor melainkan perlu memperhatikan hal teknis pemberdayaan. Pengelolaan proses pemberdayaan memerlukan perhatian banyak hal, karena proses pemberdayaan tidak semudah yang direncanakan. Selalu ada masalah ketika proses sedang dilaksanakan. Banyaknya masalah pemberdayaan masyarakat, merupakan bukti bahwa pemberdayaan memerlukan ketelitian dan keterlibatan berbagai stakeholders.

#### Protection pemberdayaan masyarakat pengrajin kuningan dan perak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan pelaku usaha industri kerajinan kuningan dan perak perlindungannya masih lemah. Pemerintah tidak konsisten menjanjikan dan

yang direalisasikan. Sedangkan industri kerajinan kuningan dan perak sudah meyebar di berbagai daerah di luar Sulawesi tenggara.

Perlindungan ini bukan hanya aspek keberlanjutan industri kerajinan kuningan dan perak, melainkan hak cipta yang perlu di lindungi, karena desain industri ini cukup variatif dan unik dipertahankan dan dim kembangkan. Selain itu, perlindungan terhadap industri kerajinan kuningan dan perak belum dibuatkan dalam kebijakan khusus. Pemerintah bukan hanya membuat regulasi umum tetapi kebijakan khusus untuk melindungi, mengembangkan dan memelihara industry kerajinan masyarakat belum ada. Ketidakhadiran regulasi terhadap perlindungan industri kerajinan rakyat, menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap instri kecil menengah. Pemerintah harus tanggap atas kemungkinan eksploitasi kerajinan kuningan dan perak oleh pemodal lokal maupun regional. Pemiarian industri tumbuh secara mandiri akan beresiko terhadap keberlanjutan industri lokal.

Pentingnya perlindungan dalam proses pemberdayaan adalah untuk mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat, (Hamid, 2018). Perlindungan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Perlunya pemberdayaan karena tujuan pemberdayaan yaitu meningkatkan keberdayaan dan mereka melindungi yang dirugikan, Iff dan Tesoriero (2008).

Pemberdayaan masyarakat bukan hanya terkait peningkatan keberdayaan masyarakat, melainkan perlindungan agar tidak di eksploitasi. Menurut Arbi Sanit dalam Chalid (2005) pemberdayaan upaya untuk mentransformasikan segenap kemampuan agar menjadi nyata, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto dalam (Lifa Indri Astuti., 2015) membagi tiga proses pemberdayaan, pertama, tahap penyadaran, target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan "pencerahan" dengan memberikan penyadaran bahwa mereka memiliki hak untuk mampu dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Mereka harus diberikan motivasi bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Kedua, tahap pengkapasitasan, tahap ini terdiri dari tiga jenis pengkapasitasan yaitu pengkapasitasan manusia, organisasi dan sistem nilai.

## PENUTUP

### Temuan

(1).Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan mulai tahap *enabling* yaitu dengan memotivasi dan memberikan penyadaran pada pelaku industri akan pentingnya pengembangan industri kreasi pernak pernik atau kerajinan kuningan dan perak yang dapat menarik minat pasar, dan bukan hanya sebagai aksesoris melainkan memiliki nilai tambah secara ekonomis, historis dan identitas lokal. (2).Pemberdayaan masyarakat pengrajin kuningan dan perak dilakukan secara individu dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat melalui pelatihan, pemberian modal usaha, adanya akses kesehatan secara mandiri dan mengikutsertakan beberapa pengrajin ke luar daerah. Namun pemberian modal usaha yang sumbernya dari pemerintah masih terbatas, sehingga masyarakat dapat mengajukan permintaan melalui perbankan. (3).Pemberdayaan masyarakat pelaku industri kerajinan kuningan dan perak juga dilakukan dengan upaya (*protection*) perlindungan oleh pemerintah melalui kebijakan, namun belum ada kebijakan khusus untuk industri kerajinan kuningan dan perak. Selain itu pemerintah tidak konsisten untuk melindungi pelaku industri, sehingga terkadang kebutuhan bahan baku industri kerajinan kuningan dan perak tidak ditemukan dipasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. (1996). Social Work and Empowerment. *Social Work and Empowerment*. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-14033-6>
- Amir, M. (2017). Kebijakan Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Kerajinan Unggulan dalam Upaya Mengangkat Kearifan Lokal Kabupaten Tuban. *Cakrawala*, 11(2), 157–169.
- Anwas. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Alfabeta.
- Apriansah, B. (2017). *Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kerajinan arloji kayu di desa pereng, kecamatan prambanan, kabupaten klaten*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. YOGYAKARTA.
- Chalid, P. (2005). Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik. *Kemitraan*, 1–155.
- Creswell, J. (2015). *Riset Pendidikan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif* (terjemahan). Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. (Ketiga.). Pustaka Pelajar, Terjemahan.
- Denhardt, J. V. D. & R. B. (Terjemahan S. P. (2013). *Pelayanan Publik Baru dari manajemen ke steering ke serving*. Kreasi Wacana.
- Dhio Adenansia, M. Z. & B. R. (2011). Partisipasi Masyarakat Dalam Program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri. *Prosiding KS: Riset & PKM Volume 2 Nomor 3*, 477–485.
- Faisal, S. (2003). *Format-Format Penelitian Sosial* (keenam). Raja Grafindo Persada.
- G. Kartasapoetra. (1987). *Pembentukan Perusahaan Industri* (1st ed.). Bina aksara.
- Ginandjar, K. (1995). *Pemberdayaan Masyarakat*. Institut Teknologi Bandung.
- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya, 1987*, 1–14.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (1st ed.). De La Macca.
- Hutomo, M. Y. (2000). Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi. *Naskah*, 20(20), 1–11.
- Kartasmita, Ginandjar. (1995). *Pemberdayaan masyarakat*. Institut Teknologi Bandung.
- Kartasmita, Ginandjar. (1998). Pemberdayaan Masyarakat Dalam. *Junral Studi Pembangunan*, 1(1), 1–13.
- Keban, Y. T. (2014). *enam dimensi strategis administrasi publik (konsep, teori dan isu)* (ketiga). Gava Media.
- Lee, J. A. B. (2001). *The Empowerment Approach to Social Work Practice (Building the Beloved Community)* (second). Columbia University Pres.
- Lifa Indri Astuti., H. & M. R. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Studi Pada Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(11), 1886–1892.
- Luh, N., Telagawathi, W. S., Yulianthini, N. N., Luh, N., & Antari, S. (2016). *Pemberdayaan Industri Kecil Kerajinan Tangan Melalui Pengembangan Kewirausahaan Di Kabupaten*. 595–604.
- McLaughlin, K. (2016). Empowerment: A critique. In *Empowerment: A Critique*. <https://doi.org/10.4324/9781315744339>
- Nanang, Supriadi & Wan, Jamaludin, Z. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Desain Kerajinan Kulit Kerang untuk Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Community Empowerment through Seashell Craft Design Training to Improve Household Economy. *Jurnal Panrita Abdi*, 5(1), 41–50.
- Narayan, D. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction*. World Bank.
- Narayan, D. (2005). *Measuring Empowerment* (Deepa Narayan (ed.)). The World Bank.
- NIMAYAH, N. I. M. 11230064. (2015). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Melalui Kerajinan Perak Oleh Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta (Kp3Y) Di Kotagede, Yogyakarta* [Universitas islam negeri Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16326/>

- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 88. <https://doi.org/10.2307/257670>.Poerwanto.
- Nugraha, A. (2009). Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5, 10. <http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id>
- Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 66–78. <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.81>
- Osborne, D. dan P. (2000). *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies For reinventing Government*. (terjemahan). PPM.
- Pranarka., O. S. P. & A. M. W. (1996). *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasinya*. CSIS.
- Santosa, A. (2020). Perbedaan Pendidikan Kesehatan Dengan Menggunakan Metode Ceramah Dan Audio Visual Terhadap Motivasi Menggunakan IUD. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(11), 1241. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i11.1730>
- Sarinah, I., Sihabudin, A. A., & Suwarlan, E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat, Universitas Galuh Pangandaran*, 5(4), 267–277. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/edueksos/article/download/4841/2364>
- Sianipar, C. P. M., Yudoko, G., Adhiutama, A., & Dowaki, K. (2013). Community Empowerment through Appropriate Technology: Sustaining the Sustainable Development. *Procedia Environmental Sciences*, 17, 1007–1016. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.120>
- Sismudjito. (2016). Pemberdayaan Sosial Ekonomi Petani Di Perkebunan Inti Rakyat: Studi Kasus Di Kisaran, Sumatera Utara. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(1). <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i1.14407>
- Soebianto, T. M. & H. P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (revisi ke). Alfabeta.
- Soetomo. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah muncul antitesisnya*. Pustaka Pelajar.
- Sulila, I. (2016). *Kerajinan Karawo Di Desa Bongo*. 22(3), 96–102.
- Sururi, A. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Administrasi Negara*, 3, 1–25. <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>
- Tambunan, T. T. . (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia (Beberapa Isu Penting)*. Salemba empat.
- Telagawathi, N. L. W. S., Yulianthini, N. N., & Antari, N. L. S. (2016). Pemberdayaan Industri Kecil Kerajinan Tangan Melalui Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Gianyar Bali. *Seminar Nasional Riset Inovatif (SENARI) Ke-4 Tahun 2016*, 595–604.
- Tesoriero, J. I. & F. (2008). *Community Development* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Wahab, S. A. (2011). *Evaluasi Kritis, Reorientasi Evaluasi Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial* (Pertama). UBpress.
- Widayanti, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan Teoritis. *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 87–102.
- Wulandari, C. (2017). *Penggunaan Model Pemberdayaan ( Unity with the People ) sebagai Pendekatan Pembelajaran Berbasis Riset*. 1(1), 27–36.
- Yusuf, H., & Hasima, R. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau. *Halu Oleo Law Review*, 2(1), 335. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4194>